

Analisis Framing Pemberitaan “Gabung *Board of Peace*, Indonesia Dukung Kemerdekaan Palestina” pada Website Republika

Najwan Akbar¹, Nazhah Syiffa Shafirra Riyadi², Nindita Meliana Putri³

^{1),2),3)} Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

e-mail correspondent: najwan.akbar23@mhs.uinjkt.ac.id

Received: 08-04-2026

Revised: 14-04-2026

Accepted: 25-04-2026

Info Artikel

Abstract

Keywords:

framing; Board of Peace; Palestine; Republika; online media

This research examines how Republika.co.id frames the news article "Gabung Board of Peace, Indonesia Dukung Kemerdekaan Palestina," published on 2 February 2026, which reports Indonesia's accession to the United States-initiated Board of Peace as an act of solidarity with Palestinian independence. Using a qualitative case study within a constructivist paradigm, this research applies Robert N. Entman's framing model; define problems, diagnose causes, make moral judgement, and treatment recommendation, supported by an in-depth interview with a communication expert as a method triangulation source. The expert informant agreed to be interviewed on the condition that their identity would remain confidential; therefore, they are referred to in this study as "Communication Expert." The findings show that Republika frames Indonesia's accession not as a contradiction of its Palestine solidarity but as a strategic and legitimate diplomatic step, diagnoses "political opponents" as the cause of the public's misperception, morally justifies the policy through constitutional and humanitarian values, and recommends public trust in the government's diplomatic direction. The article relies on a single source affiliated with the presidential support network, without a counterbalancing perspective, indicating one-sided framing that legitimizes government policy rather than critically scrutinizing it. These findings affirm that Islamic-oriented online media can function as an instrument of political legitimation under an editorial banner of humanitarian solidarity.

Abstrak.

Kata kunci:

Framing; *Board of Peace*;
Palestina; Republika;
Media Daring.

Penelitian ini mengkaji bagaimana Republika.co.id membingkai pemberitaan berjudul "Gabung *Board of Peace*, Indonesia Dukung Kemerdekaan Palestina" yang dipublikasikan pada 2 Februari 2026, yang melaporkan keikutsertaan Indonesia dalam *Board of Peace* bentukan Amerika Serikat sebagai bentuk solidaritas terhadap kemerdekaan Palestina. Dengan pendekatan kualitatif jenis studi kasus dalam paradigma konstruktivis, penelitian ini menggunakan model framing Robert N. Entman yang terdiri atas *define problems*, *diagnose causes*, *make moral judgement*, dan *treatment recommendation*, didukung wawancara mendalam dengan seorang dosen komunikasi sebagai triangulasi metode. Narasumber ahli bersedia diwawancarai dengan syarat identitasnya tidak dipublikasikan, sehingga dalam penelitian ini disebut sebagai "Ahli Komunikasi" sesuai permintaan yang bersangkutan. Hasil penelitian menunjukkan Republika membingkai keikutsertaan Indonesia bukan sebagai kontradiksi terhadap solidaritas Palestina, melainkan sebagai langkah diplomasi strategis yang legitim; mendiagnosis "musuh politik" sebagai penyebab persepsi keliru publik; memberikan pembenaran moral melalui nilai konstitusi dan kemanusiaan; serta merekomendasikan kepercayaan publik terhadap arah diplomasi pemerintah. Artikel ini hanya mengandalkan satu narasumber yang berafiliasi dengan jejaring pendukung presiden, tanpa perspektif penyeimbang, yang mengindikasikan framing satu sisi yang melegitimasi kebijakan pemerintah ketimbang mengujinya secara kritis. Temuan ini menegaskan bahwa media daring berbasis nilai Islam dapat berfungsi sebagai instrumen legitimasi politik di bawah bendera editorial solidaritas kemanusiaan.

PENDAHULUAN

Konflik antara Palestina dan Israel hingga kini masih menjadi salah satu isu kemanusiaan sekaligus geopolitik yang terus memperoleh perhatian luas dari komunitas internasional. Permasalahan tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan dimensi politik dan keamanan, melainkan juga menyentuh aspek kemanusiaan yang memberikan dampak signifikan terhadap keberlangsungan hidup masyarakat Palestina. Dalam konteks penyelesaian konflik ini, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menerbitkan sejumlah resolusi yang menunjukkan komitmen global terhadap upaya penyelesaiannya (United Nations, 2024).

Indonesia selama ini dikenal sebagai negara yang secara konsisten menunjukkan keberpihakan terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina. Sikap tersebut berakar pada amanat yang termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan bahwa kemerdekaan merupakan hak bagi seluruh bangsa, sementara penjajahan harus dihapuskan karena bertentangan dengan nilai perikemanusiaan dan keadilan (UUD 1945). Bentuk nyata dari komitmen Indonesia terhadap Palestina diwujudkan melalui berbagai langkah diplomasi di tingkat internasional. Sikap tersebut menjadi elemen penting dalam arah kebijakan luar negeri Indonesia, khususnya dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina melalui berbagai forum global.

Pada Januari 2026, pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk bergabung dengan organisasi *Board of Peace* yang diresmikan dalam forum di Davos, Swiss. Keputusan Indonesia untuk menjadi bagian dari forum tersebut memunculkan beragam tanggapan di tengah masyarakat, terutama karena dikaitkan dengan konsistensi posisi Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina (Putra, 2026). Sebagian kalangan memandang keputusan tersebut sebagai manifestasi diplomasi aktif Indonesia dalam mendorong terciptanya perdamaian dunia. Sebaliknya, terdapat pula pandangan yang mempertanyakan apakah partisipasi Indonesia dalam *Board of Peace* masih sejalan dengan orientasi kebijakan luar negeri Indonesia yang selama ini berpihak pada perjuangan Palestina (Putra, 2026).

Perbedaan persepsi tersebut kemudian berkembang melalui berbagai pemberitaan di media massa. Dalam hal ini, media tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi kepada publik, tetapi juga memiliki peran strategis dalam membentuk cara pandang masyarakat terhadap suatu peristiwa melalui konstruksi berita yang dipilih. Sebagai salah satu media yang aktif menyoroti isu Palestina, Republika turut intens memberitakan berbagai kebijakan Indonesia yang berkaitan dengan perjuangan kemerdekaan Palestina. Dengan karakteristik sebagai media yang berlandaskan nilai-nilai Islam,

Republika menunjukkan perhatian yang besar terhadap isu-isu keumatan dan kemanusiaan, termasuk konflik Palestina-Israel (Republika, 2022).

Artikel Republika yang berjudul “Gabung *Board of Peace*, Indonesia Dukung Kemerdekaan Palestina” dan dipublikasikan pada 2 Februari 2026 menjadi menarik untuk dikaji karena menghadirkan narasi bahwa keterlibatan Indonesia dalam *Board of Peace* diposisikan sebagai bentuk dukungan terhadap perjuangan Palestina melalui jalur diplomasi internasional (Putra, 2026). Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas framing media terkait isu Palestina. Lestari dan Mahmud (2021) mengungkapkan bahwa Republika memiliki kecenderungan framing yang lebih empatik terhadap Palestina dibandingkan dengan media lainnya. Sementara itu, Fadillah (2022) menjelaskan bahwa media Islam membangun narasi solidaritas Palestina melalui konstruksi pemberitaan yang spesifik.

Penelitian lain oleh Azhari dan Nurhayati (2022) menunjukkan adanya variasi framing di media internasional dalam melaporkan konflik Palestina-Israel. Di sisi lain, Haryanto (2023) menemukan bahwa media nasional lebih banyak mengonstruksi konflik Palestina sebagai persoalan kemanusiaan yang mendesak untuk segera ditangani. Walaupun demikian, kajian mengenai framing media Islam di Indonesia yang secara khusus menyoroti keterlibatan Indonesia dalam forum perdamaian internasional seperti *Board of Peace* masih relatif terbatas. Atas dasar itu, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis framing pada pemberitaan “Gabung *Board of Peace*, Indonesia Dukung Kemerdekaan Palestina” di situs Republika, guna memahami bagaimana media tersebut membangun realitas mengenai diplomasi Indonesia serta dukungannya terhadap kemerdekaan Palestina.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan berlandaskan paradigma konstruktivis. Pemilihan pendekatan kualitatif didasarkan pada tujuan penelitian yang berfokus untuk memahami secara mendalam proses media dalam membentuk realitas melalui teks pemberitaan. Sementara itu, paradigma konstruktivis digunakan dengan asumsi bahwa berita bukanlah representasi realitas yang bersifat netral, melainkan hasil konstruksi yang dipengaruhi oleh sudut pandang, kepentingan, serta kebijakan redaksional media.

Objek dalam penelitian ini berupa teks berita berjudul “Gabung *Board of Peace*, Indonesia Dukung Kemerdekaan Palestina” yang dipublikasikan oleh Republika.co.id pada 2 Februari 2026 dan ditulis oleh Erik Purnama Putra. Analisis terhadap objek penelitian mencakup unsur judul, subjudul, lead, isi narasi, pilihan kata, hingga kutipan dari narasumber yang termuat dalam berita. Sementara itu, subjek penelitian adalah Republika.co.id sebagai media daring berbasis Islam yang telah memperoleh

verifikasi dari Dewan Pers Indonesia (Sertifikat Nomor 1058/DP-Verifikasi/K/XII/2022) dan menjadi pihak yang memproduksi sekaligus mempublikasikan berita tersebut.

Teknik utama dalam pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi terhadap teks berita yang menjadi objek kajian. Sebagai upaya memperkuat data melalui triangulasi metode, peneliti juga melaksanakan wawancara mendalam dengan seorang dosen sekaligus ahli komunikasi yang memiliki pemahaman mengenai analisis framing. Langkah ini dilakukan untuk memperoleh pandangan eksternal terkait tingkat objektivitas serta kecenderungan framing dalam artikel yang dianalisis.

Proses analisis data menggunakan model framing Robert N. Entman (1993), yang menguraikan teks ke dalam empat unsur utama, yaitu *define problems* (cara media mendefinisikan suatu peristiwa sebagai persoalan), *diagnose causes* (pihak atau faktor yang diposisikan sebagai penyebab), *make moral judgement* (nilai moral yang dipakai sebagai dasar legitimasi), dan *treatment recommendation* (solusi atau arah sikap yang ditawarkan kepada pembaca). Temuan dari analisis teks selanjutnya dikonfirmasi melalui hasil wawancara sebagai bentuk validasi silang guna memperkuat interpretasi penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Analisis framing terhadap artikel "Gabung *Board of Peace*, Indonesia Dukung Kemerdekaan Palestina" yang dipublikasikan Republika.co.id pada 2 Februari 2026 menghasilkan temuan sebagai berikut berdasarkan empat elemen model Robert N. Entman (1993).

Tabel 1. Profil Artikel yang Dianalisis

Aspek	Keterangan
Judul Berita	Gabung <i>Board of Peace</i> , Indonesia Dukung Kemerdekaan Palestina
Media	Republika.co.id
Penulis	Erik Purnama Putra
Tanggal Publikasi	2 Februari 2026
Jumlah Narasumber dalam Berita	1 (berafiliasi dengan jejaring pendukung presiden)
Status Verifikasi Media	Dewan Pers RI, Sertifikat No. 1058/DP-Verifikasi/K/XII/2022
Sumber Triangulasi	Wawancara mendalam dengan Ahli Komunikasi (identitas dirahasiakan)

Sumber: Data diperoleh dari Republika.co.id, 2026.

Tabel 2. Matriks Hasil Analisis Framing Robert N. Entman

Elemen Framing	Temuan Tekstual	Indikator Utama	Konfirmasi Wawancara Ahli
<i>Define Problems</i>	Keikutsertaan Indonesia dalam BOP dibingkai sebagai bukti komitmen diplomasi pro-Palestina, bukan dilema kebijakan	Judul berita menyandingkan BOP dengan dukungan Palestina; latar belakang BOP yang diinisiasi AS direduksi	Pemilihan sumber hanya dari kelompok pendukung pemerintah, tanpa cover both side
<i>Diagnose Causes</i>	“Musuh politik” dan kesalahpahaman publik diposisikan sebagai sumber kontroversi, bukan kebijakan itu sendiri	Pengalihan tanggung jawab dari aktor utama (pemerintah) ke aktor sekunder (penentang/oposisi)	Pengalihan tanggung jawab dari aktor utama (pemerintah) ke aktor sekunder (penentang/oposisi)
<i>Make Moral Judgement</i>	Legitimasi moral dibangun melalui amanat konstitusi UUD 1945 dan nilai solidaritas Islam-kemanusiaan	Kritik terhadap kebijakan dikonstruksi seolah bertentangan dengan nilai luhur bangsa dan agama	Argumen moral dinilai memperkuat ketidakseimbangan framing, bukan menguji kebijakan secara kritis
<i>Treatment Recommendation</i>	Publik diarahkan untuk mempercayai arah diplomasi	Hanya satu narasumber yang sejalan dengan pemerintah; tidak	Pola ini dinilai sebagai ciri khas framing yang

Analisis Framing Pemberitaan “Gabung *Board of Peace*, Indonesia Dukung Kemerdekaan Palestina” pada Website Republika

	pemerintah tanpa perspektif pemandangan	ada suara LSM, akademisi, atau aktivis pro-Palestina	berpihak pada pemerintah
--	---	--	-----------------------------

Sumber: Data diperoleh dari Penulis, 2026.

PEMBAHASAN



Gambar 1. Tangkapan layar artikel Republika.co.id “Gabung *Board of Peace*, Indonesia Dukung Kemerdekaan Palestina”, 2026.

***Define Problems:* Keikutsertaan Indonesia sebagai Langkah Diplomasi Pro-Palestina**

Dalam model framing Robert N. Entman, elemen pertama yaitu *define problems* berfungsi untuk mengarahkan perhatian khalayak terhadap bagaimana media memosisikan suatu peristiwa sebagai persoalan tertentu. Pada artikel “Gabung *Board of Peace*, Indonesia Dukung Kemerdekaan Palestina” yang dipublikasikan Republika.co.id pada 2 Februari 2026, konstruksi utama yang dibangun media terletak pada penempatan keikutsertaan Indonesia dalam *Board of Peace* (BOP) sebagai bentuk keberpihakan terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina. Republika tidak memandang peristiwa tersebut sebagai dilema dalam kebijakan luar negeri, tetapi justru menampilkan narasi bahwa langkah tersebut merupakan pembuktian komitmen diplomatik Indonesia terhadap Palestina melalui jalur multilateral (Putra, 2026).

Pola konstruksi semacam ini selaras dengan pandangan Entman (1993) yang menjelaskan bahwa media membentuk realitas dengan menonjolkan aspek tertentu sekaligus mengesampingkan aspek lainnya. Dalam konteks ini, Republika menitikberatkan pada argumentasi bahwa BOP merupakan instrumen bagi perdamaian global, sembari mereduksi perdebatan mengenai latar belakang organisasi tersebut yang dibentuk di bawah pengaruh kebijakan luar negeri Amerika Serikat pada masa Presiden Trump. Kehadiran satu-satunya narasumber yang berasal dari kelompok pendukung

pemerintah semakin menguatkan definisi persoalan yang dibangun sesuai perspektif pemerintah, tanpa menghadirkan pandangan alternatif (Putra, 2026).

Temuan ini diperkuat melalui hasil wawancara dengan ahli komunikasi yang menyatakan bahwa pemberitaan tersebut secara tegas memperlihatkan kecenderungan membenaran terhadap kebijakan pemerintah serta tidak menyediakan ruang bagi perspektif yang berlawanan. Menurut narasumber, pemilihan sumber informasi dalam artikel tersebut telah menunjukkan orientasi pemberitaan yang hanya berfungsi untuk memperkuat pernyataan pemerintah tanpa menerapkan prinsip *cover both side* (Ahli Komunikasi, 2026). Dalam pandangan Shoemaker dan Reese (2014), absennya perspektif penyeimbang merupakan karakteristik framing yang mengarah pada agenda tertentu, baik agenda redaksional maupun kepentingan kekuasaan.

Framing yang dibangun tersebut tidak hadir dalam ruang kosong. Sebagai media yang berlandaskan nilai-nilai Islam, Republika memiliki komitmen editorial terhadap isu Palestina. Namun, dalam konteks artikel ini, komitmen tersebut digunakan untuk menghubungkan partisipasi Indonesia dalam BOP dengan narasi solidaritas kemanusiaan (Lestari & Mahmud, 2021). Fenomena ini sejalan dengan konsep *agenda-setting* yang dikemukakan McCombs dan Shaw (1972), di mana media bukan hanya menentukan isu apa yang penting untuk dipikirkan publik, tetapi juga membentuk cara publik memahami isu tersebut. Dalam hal ini, Republika membingkai keikutsertaan Indonesia dalam BOP sebagai sesuatu yang wajar sekaligus diperlukan dalam kerangka perjuangan Palestina.

Diagnose Causes: Musuh Politik sebagai Akar Kesalahpahaman Publik

Elemen kedua dalam model framing Entman adalah *diagnose causes*, yaitu cara media mengidentifikasi aktor atau kondisi yang dipandang sebagai penyebab munculnya persoalan yang sedang dibingkai. Dalam artikel Republika, sumber persoalan yang ditampilkan terkait kontroversi keikutsertaan Indonesia dalam BOP bukan terletak pada kebijakan itu sendiri, melainkan pada kesalahpahaman publik yang dianggap muncul akibat pengaruh “musuh politik” atau pihak-pihak yang secara sengaja memelintir informasi demi melemahkan legitimasi kebijakan pemerintah (Putra, 2026). Dengan konstruksi tersebut, Republika tidak memosisikan keputusan Indonesia bergabung dalam BOP sebagai persoalan, tetapi justru persepsi negatif masyarakat terhadap keputusan itulah yang dijadikan masalah utama.

Menurut Pan dan Kosicki (1993), pola hubungan sebab-akibat semacam ini merupakan strategi framing yang umum dipakai media untuk mengalihkan tanggung jawab dari aktor utama, yaitu pemerintah Indonesia selaku pengambil kebijakan bergabung dengan BOP, kepada aktor sekunder, yakni pihak-pihak yang mengkritik atau mempertanyakan kebijakan tersebut dan dilabeli sebagai

“musuh politik”, yang dalam konstruksi Republika dipersepsikan sebagai pihak pengganggu yang menyebarkan kesalahpahaman di kalangan publik. Dengan menempatkan “musuh politik” sebagai penyebab utama lahirnya kesalahpahaman, Republika secara tidak langsung menegaskan bahwa keputusan bergabung dengan BOP merupakan langkah yang benar, sementara persoalan hanya terletak pada penafsiran yang salah dari pihak-pihak tertentu yang dianggap tidak bertanggung jawab.

Pandangan tersebut diperkuat oleh keterangan ahli komunikasi yang diwawancarai dalam penelitian ini. Ia menilai bahwa konstruksi sebab seperti itu merupakan bentuk framing yang lazim digunakan, khususnya ketika sebuah kebijakan pemerintah memunculkan polemik. Dalam situasi demikian, media yang berpihak kepada pemerintah cenderung menggambarkan kontroversi sebagai hasil politisasi, bukan sebagai konsekuensi dari kebijakan yang memang memiliki persoalan mendasar. Narasumber juga menyoroti bahwa *Board of Peace* sendiri dibentuk dengan muatan agenda politik yang kuat dari Trump dan tidak melibatkan representasi Palestina, sehingga klaim bahwa partisipasi dalam BOP merupakan dukungan terhadap Palestina secara logis justru bertentangan dengan fakta yang ada (Ahli Komunikasi, 2026).

Kondisi tersebut memiliki keterkaitan dengan temuan Azhari dan Nurhayati (2022) yang menunjukkan bahwa media nasional sering kali mengadopsi framing pemerintah, terutama dalam isu kebijakan luar negeri yang sensitif. Penempatan penyebab persoalan kepada “musuh” atau pihak “penentang” berfungsi sebagai strategi untuk memperkokoh legitimasi narasi tunggal pemerintah sekaligus melemahkan kredibilitas pandangan kritis yang berkembang di masyarakat (Tuchman, 1978).

Make Moral Judgement: Legitimasi Nilai Konstitusional dan Kemanusiaan

Elemen ketiga dalam model framing Entman adalah *make moral judgement*, yaitu bagaimana media menggunakan nilai, norma, atau prinsip moral tertentu untuk memberikan penilaian terhadap situasi maupun aktor yang terlibat. Dalam artikel Republika, legitimasi moral atas keikutsertaan Indonesia dalam BOP dibangun melalui dua landasan utama, yakni amanat konstitusi dan nilai-nilai kemanusiaan universal. Secara konsisten, Republika menghubungkan langkah pemerintah tersebut dengan mandat yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945, yang menegaskan komitmen Indonesia untuk berpartisipasi dalam upaya menciptakan perdamaian dunia (Putra, 2026).

Pemanfaatan nilai-nilai konstitusional sebagai dasar legitimasi moral merupakan strategi retorik yang memiliki daya pengaruh kuat. Entman (2004) menjelaskan fenomena ini sebagai *moral framing*, yakni ketika suatu tindakan kebijakan dikaitkan dengan prinsip-prinsip luhur sehingga penolakan terhadap kebijakan tersebut secara tidak langsung dapat dipersepsikan sebagai bentuk penolakan terhadap nilai-nilai itu sendiri. Dalam konteks ini, sikap menolak atau mengkritisi keikutsertaan

Indonesia dalam BOP dikonstruksikan oleh Republika sebagai bentuk ketidakpahaman terhadap komitmen konstitusional Indonesia dalam memperjuangkan perdamaian dan kemerdekaan bangsa-bangsa.

Selain menggunakan legitimasi konstitusional, Republika juga memanfaatkan narasi solidaritas Islam dan kemanusiaan sebagai penguat pembenaran moral dalam pemberitaannya. Sebagai media yang berlandaskan nilai-nilai Islam, Republika memiliki modal simbolik yang cukup besar dalam merepresentasikan nilai-nilai keumatan. Pemanfaatan modal simbolik tersebut dalam membingkai kebijakan pemerintah menghasilkan lapisan legitimasi ganda, yaitu legitimasi politik yang bersumber dari konstitusi serta legitimasi religius-moral yang berakar pada nilai Islam (Fadillah, 2022). Kondisi ini menjadikan kritik terhadap kebijakan tersebut tampak seolah tidak hanya berlawanan dengan kepentingan nasional, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai Islam dan kemanusiaan.

Ahli komunikasi yang diwawancarai dalam penelitian ini menilai bahwa penggunaan argumen moral seperti itu justru memperkuat dugaan adanya framing yang tidak seimbang. Ketika media menggunakan dasar moral untuk membenarkan kebijakan yang secara faktual masih menuai kontroversi, fungsi media sebagai pilar demokrasi yang seharusnya kritis menjadi berkurang dan bergeser menjadi alat legitimasi kekuasaan (Ahli Komunikasi, 2026). Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Haryanto (2023) yang menunjukkan bahwa media nasional kerap memakai framing kemanusiaan sebagai cara untuk menutupi ruang-ruang kritis dalam pemberitaan kebijakan luar negeri.

Treatment Recommendation: Imbauan Kepercayaan Publik terhadap Diplomasi Pemerintah

Elemen keempat dalam model framing Entman adalah *treatment recommendation*, yaitu solusi atau arah tindakan yang secara eksplisit maupun implisit ditawarkan media kepada khalayak. Dalam artikel Republika, rekomendasi yang dapat diidentifikasi berupa ajakan kepada masyarakat untuk menaruh kepercayaan terhadap arah diplomasi pemerintah serta tidak terpengaruh oleh narasi yang dianggap menyesatkan. Pembaca diarahkan untuk memandang keikutsertaan Indonesia dalam BOP sebagai keputusan strategis yang telah melalui pertimbangan matang dalam kerangka kepentingan nasional dan solidaritas internasional (Putra, 2026).

Rekomendasi tersebut dibangun melalui penggunaan satu narasumber tunggal yang menyampaikan pandangan positif serta mendukung kebijakan pemerintah tanpa adanya perspektif pembanding yang bersifat kritis maupun mempertanyakan langkah tersebut. Goffman (1974) menjelaskan bahwa framing bekerja sebagai skema interpretasi yang membantu individu dalam memahami realitas. Ketika skema interpretasi yang disajikan hanya bergerak dalam satu arah, maka secara tidak langsung publik diarahkan untuk menerima realitas sebagaimana yang dikonstruksi media.

Dalam wawancara yang dilakukan, narasumber ahli menegaskan bahwa pola semacam ini merupakan ciri khas framing yang berpihak pada pemerintah. Pemberitaan disusun dengan nada yang meyakinkan, didukung oleh narasumber yang sejalan, serta tanpa menyediakan ruang bagi argumen tandingan. Rekomendasi yang tersirat dari konstruksi tersebut adalah bahwa masyarakat sebaiknya memberikan kepercayaan penuh kepada pemerintah tanpa mempertanyakan keputusan yang telah diambil. Narasumber juga menambahkan bahwa pemberitaan yang berimbang semestinya menghadirkan suara dari LSM, akademisi, maupun aktivis pro-Palestina yang dapat memberikan perspektif berbeda terkait relevansi BOP dalam konteks perjuangan Palestina (Ahli Komunikasi, 2026).

Temuan ini memperkuat argumentasi Norris, Kern, dan Just (2003) yang menyatakan bahwa framing media dalam isu kebijakan luar negeri sering berfungsi sebagai mekanisme dukungan elite. Dalam praktik tersebut, media cenderung memilih bingkai yang selaras dengan posisi pemerintah dan menyajikannya sebagai sudut pandang yang paling logis serta dapat diterima publik. Ketidadaan perspektif alternatif dalam artikel ini tidak hanya menunjukkan keterbatasan liputan, tetapi juga mengindikasikan adanya pilihan editorial yang secara sadar dilakukan untuk membatasi ruang perdebatan publik mengenai isu tersebut.

Konfirmasi Triangulasi: Penilaian Ahli Komunikasi terhadap Framing Republika

Sebagai bagian dari penerapan triangulasi metode, penelitian ini melibatkan wawancara mendalam dengan seorang dosen komunikasi dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang memiliki kompetensi dalam bidang analisis framing dan jurnalisme media Islam. Keterangan dari narasumber ahli tersebut digunakan sebagai instrumen untuk mengonfirmasi sekaligus memperkuat hasil analisis teks terhadap artikel Republika yang telah dilakukan sebelumnya.

Secara umum, narasumber ahli menilai bahwa artikel Republika tersebut secara tegas menunjukkan pola framing yang tidak seimbang dan cenderung mendukung kebijakan pemerintah. Ia menyoroti tiga aspek utama yang menjadi indikatornya. Pertama, pemilihan narasumber yang hanya berasal dari kelompok pendukung pemerintah tanpa menerapkan prinsip *cover both side*. Kedua, judul berita yang sejak awal telah memperlihatkan posisi editorial yang berpihak dengan menyandingkan BOP dan dukungan terhadap Palestina, padahal secara faktual keduanya memiliki hubungan yang kontradiktif. Ketiga, narasi yang dibangun dalam artikel dinilai telah membelokkan fakta mengenai karakter serta komposisi BOP itu sendiri (Ahli Komunikasi, 2026).

Lebih lanjut, narasumber ahli juga menekankan satu konteks akademik yang penting, yakni bahwa dalam analisis framing, perhatian tidak hanya diarahkan pada apa yang dituliskan dalam teks,

tetapi juga pada apa yang dihilangkan. Tidak dicantumkannya informasi mengenai komposisi anggota BOP yang tidak melibatkan negara-negara Arab maupun Palestina, serta absennya pandangan dari organisasi pro-Palestina yang mempertanyakan relevansi BOP, dipandang sebagai bagian dari proses framing itu sendiri. Dengan demikian, elemen-elemen yang tidak dimunculkan dalam teks berita memiliki bobot makna yang sama pentingnya dengan informasi yang ditampilkan (Ahli Komunikasi, 2026).

Konfirmasi dari narasumber ahli tersebut selaras dengan konsep framing Entman (1993) yang menegaskan bahwa framing bekerja melalui mekanisme seleksi dan penonjolan. Media memilih sebagian aspek dari realitas yang dipersepsikan, kemudian menempatkannya secara dominan dalam teks komunikasi sehingga mendorong terbentuknya definisi masalah, interpretasi sebab, evaluasi moral, serta rekomendasi penyelesaian tertentu. Dalam konteks artikel *Republika* ini, keempat elemen tersebut secara konsisten mengarah pada satu kesimpulan, yaitu bahwa keikutsertaan Indonesia dalam BOP diposisikan sebagai langkah yang tepat dan patut memperoleh dukungan publik.

Hasil triangulasi ini juga mempertegas argumentasi Van Dijk (1988) yang menyatakan bahwa wacana media pada dasarnya tidak pernah bersifat netral, karena selalu membawa perspektif tertentu yang dipengaruhi oleh ideologi, kepentingan ekonomi, serta relasi kekuasaan yang melingkupi institusi media. Dalam konteks *Republika* sebagai media Islam yang memiliki keterkaitan historis dengan gerakan sosial-politik Islam di Indonesia, framing terhadap isu kebijakan luar negeri seperti ini mencerminkan proses negosiasi yang kompleks antara identitas keislaman, kepentingan nasional, dan dinamika hubungan antara media dan kekuasaan.

Implikasi Teoretis: Media Islam sebagai Instrumen Legitimasi Politik

Hasil penelitian ini memberikan kontribusi teoretis yang penting dalam pengembangan kajian framing media Islam di Indonesia. Sebagaimana dijelaskan oleh Severin dan Tankard (2001), framing merupakan proses aktif media dalam membentuk pemahaman publik melalui pola penyajian informasi yang dipilih. Dalam konteks penelitian ini, *Republika* tidak hanya menjalankan fungsi informatif dengan melaporkan suatu peristiwa, tetapi juga berperan aktif dalam membangun konstruksi realitas mengenai kebijakan luar negeri Indonesia dengan orientasi yang menguntungkan pemerintah.

Lebih jauh, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa media yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan tidak terlepas dari kecenderungan framing yang bersifat politis. Bahkan, nilai-nilai keagamaan dapat menjadi instrumen legitimasi yang lebih kuat dibandingkan argumen politik konvensional karena menyentuh dimensi moral sekaligus identitas kolektif pembacanya (Hamad,

2004). Dalam kasus ini, Republika memanfaatkan modal simbolik keislaman dan sentimen solidaritas terhadap Palestina untuk membangun konsensus publik yang mendukung arah kebijakan pemerintah.

Implikasi tersebut memiliki keterkaitan langsung dengan diskursus mengenai independensi media Islam dalam lanskap demokrasi Indonesia pasca-reformasi. Ketika media seperti Republika, yang memiliki basis pembaca Muslim yang luas serta tingkat kepercayaan tinggi sebagai media berbasis nilai Islam, lebih memilih memosisikan diri sebagai penyampai narasi kebijakan pemerintah daripada menjalankan fungsi penyeimbang kekuasaan (*watchdog*), maka eksistensi media sebagai salah satu pilar demokrasi patut kembali dipertanyakan (Siregar, 2019). Temuan ini sekaligus mendorong para peneliti komunikasi untuk lebih kritis dalam menelaah hubungan antara identitas editorial media Islam dengan orientasi politik yang melingkupinya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pemberitaan berjudul “Gabung *Board of Peace*, Indonesia Dukung Kemerdekaan Palestina” pada situs Republika.co.id memperlihatkan pola framing yang tidak berimbang dan secara konsisten mengarah pada upaya legitimasi terhadap kebijakan pemerintah. Melalui analisis dengan model framing Robert N. Entman (1993) yang diperkuat oleh hasil wawancara ahli sebagai bagian dari triangulasi metode, ditemukan empat pola framing utama yang saling berkaitan dan memperkuat satu sama lain. Pertama, pada elemen *define problems*, Republika mengonstruksi keikutsertaan Indonesia dalam *Board of Peace* bukan sebagai bentuk kontroversi kebijakan, melainkan sebagai manifestasi komitmen diplomasi strategis yang berpihak pada Palestina. Kedua, dalam elemen *diagnose causes*, Republika menempatkan “musuh politik” dan kesalahpahaman publik sebagai sumber persoalan, alih-alih mempertanyakan relevansi BOP dalam konteks perjuangan kemerdekaan Palestina. Ketiga, pada elemen *make moral judgement*, Republika membangun legitimasi moral melalui dua fondasi utama, yaitu amanat konstitusional UUD 1945 serta nilai solidaritas Islam dan kemanusiaan, sehingga kritik terhadap kebijakan tersebut diposisikan seolah sebagai bentuk pengingkaran terhadap nilai-nilai luhur. Keempat, dalam elemen *treatment recommendation*, Republika secara implisit mengarahkan masyarakat untuk menaruh kepercayaan terhadap arah diplomasi pemerintah tanpa menyediakan perspektif alternatif yang memungkinkan pembaca membangun penilaian secara independen. Temuan ini menegaskan bahwa media yang berlandaskan nilai-nilai Islam seperti Republika dapat berfungsi sebagai instrumen legitimasi politik, di mana modal simbolik keislaman serta sentimen solidaritas terhadap Palestina dimanfaatkan untuk membentuk konsensus publik yang mendukung kebijakan pemerintah. Pola tersebut tidak hanya menunjukkan kecenderungan editorial tertentu, tetapi juga mengungkap adanya dinamika hubungan yang kompleks

antara media Islam, identitas keagamaan, dan kekuasaan politik dalam konteks demokrasi Indonesia kontemporer.

SARAN

Berdasarkan hasil temuan dan kesimpulan penelitian ini, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan. Pertama, bagi peneliti berikutnya, disarankan untuk melakukan analisis framing secara komparatif antara Republika dan media Islam lain seperti Hidayatullah.com maupun media nasional arus utama dalam memberitakan isu *Board of Peace*. Langkah tersebut penting untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai pola framing media Indonesia terhadap isu kebijakan luar negeri yang sensitif. Kedua, penelitian ini hanya berfokus pada satu artikel sehingga kajian lanjutan perlu dilakukan dengan cakupan korpus yang lebih luas, melibatkan sejumlah artikel dalam rentang waktu tertentu, agar kecenderungan framing Republika dapat dipahami dan digeneralisasi dengan tingkat keyakinan yang lebih tinggi. Selain itu, pendekatan *critical discourse analysis* dapat dipertimbangkan sebagai pelengkap untuk memperdalam analisis mengenai hubungan antara teks, konteks, dan kekuasaan. Ketiga, bagi praktisi jurnalisme media Islam, penelitian ini menjadi pengingat mengenai pentingnya menjaga prinsip *cover both side* serta independensi editorial, terutama dalam isu kebijakan luar negeri yang berkaitan erat dengan kepentingan komunitas Muslim secara luas. Media Islam memiliki tanggung jawab moral yang besar untuk memastikan bahwa kepercayaan pembaca tidak digunakan sebagai alat kepentingan politik tertentu. Keempat, bagi masyarakat umum dan komunitas Muslim Indonesia secara khusus, penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan literasi media dan kemampuan berpikir kritis dalam mengonsumsi informasi, terutama pada isu yang memiliki muatan politik dan identitas. Masyarakat perlu membiasakan diri membandingkan pemberitaan dari berbagai sumber sebelum membangun opini terkait kebijakan yang kompleks seperti keterlibatan Indonesia dalam forum-forum perdamaian internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Azhari, F., & Nurhayati, S. (2022). Framing konflik Palestina-Israel pada media internasional: Analisis komparatif Al Jazeera dan BBC. *Jurnal Komunikasi Global*, 11(1), 45–62. <https://doi.org/10.24815/jkg.v11i1.22341>
- Bennett, W. L. (2016). *News: The politics of illusion* (10th ed.). University of Chicago Press.
- Berger, P. L., & Luckmann, T. (1966). *The social construction of reality: A treatise in the sociology of knowledge*. Doubleday.
- D'Angelo, P., & Kuypers, J. A. (Eds.). (2010). *Doing news framing analysis: Empirical and theoretical perspectives*. Routledge.

- Ahli Komunikasi [Nama disamarkan atas permintaan narasumber]. (2026). Wawancara mendalam mengenai analisis framing pemberitaan Republika tentang Board of Peace. Wawancara oleh Najwan Akbar, Nazhah Syiffa Shafirra Riyadi, & Nindita Meliana Putri, Juni 2026.
- Entman, R. M. (1993). Framing: Toward clarification of a fractured paradigm. *Journal of Communication*, 43(4), 51–58. <https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1993.tb01304.x>
- Entman, R. M. (2004). *Projections of power: Framing news, public opinion, and U.S. foreign policy*. University of Chicago Press.
- Eriyanto. (2012). *Analisis framing: Konstruksi, ideologi, dan politik media*. LKiS.
- Fadillah, D. (2022). Konstruksi narasi solidaritas Palestina dalam media Islam Indonesia. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 19(2), 113–128. <https://doi.org/10.31315/jik.v19i2.6143>
- Fairclough, N. (2003). *Analysing discourse: Textual analysis for social research*. Routledge.
- Goffman, E. (1974). *Frame analysis: An essay on the organization of experience*. Harvard University Press.
- Gitlin, T. (1980). *The whole world is watching: Mass media in the making and unmaking of the New Left*. University of California Press.
- Hamad, I. (2004). *Konstruksi realitas politik dalam media massa: Sebuah studi critical discourse analysis terhadap berita-berita politik*. Granit.
- Haryanto, I. (2023). Framing pemberitaan konflik Palestina pada media nasional Indonesia: Antara kepentingan kemanusiaan dan kepentingan nasional. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 11(1), 1–15. <https://doi.org/10.24198/jkk.v11i1.41025>
- Iyengar, S. (1991). *Is anyone responsible? How television frames political issues*. University of Chicago Press.
- Kuypers, J. A. (2010). Framing analysis from a rhetorical perspective. In P. D’Angelo & J. A. Kuypers (Eds.), *Doing news framing analysis* (pp. 286–311). Routledge.
- Lestari, D., & Mahmud, A. (2021). Framing empati media Islam terhadap isu Palestina: Studi komparatif Republika dan Kompas. *Al-I’lam: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, 8(1), 30–45. <https://doi.org/10.31764/jail.v8i1.5012>
- Littlejohn, S. W., & Foss, K. A. (2011). *Theories of human communication* (10th ed.). Waveland Press.
- McCombs, M., & Shaw, D. (1972). The agenda-setting function of mass media. *Public Opinion Quarterly*, 36(2), 176–187. <https://doi.org/10.1086/267990>
- McQuail, D. (2010). *McQuail’s mass communication theory* (6th ed.). SAGE Publications.
- Norris, P., Kern, M., & Just, M. (Eds.). (2003). *Framing terrorism: The news media, the government, and the public*. Routledge.

- Pan, Z., & Kosicki, G. M. (1993). Framing analysis: An approach to news discourse. *Political Communication*, 10(1), 55–75. <https://doi.org/10.1080/10584609.1993.9962963>
- Putra, E. P. (2026, 2 Februari). Gabung Board of Peace, Indonesia dukung kemerdekaan Palestina. *Republika.co.id*. <https://www.republika.co.id/berita/smdlk5477/gabung-board-of-peace-indonesia-dukung-kemerdekaan-palestina>
- Republika. (2022). Sertifikat verifikasi Dewan Pers Indonesia Nomor 1058/DP-Verifikasi/K/XII/2022.
- Reese, S. D. (2001). Framing public life: A bridging model for media research. In S. D. Reese, O. H. Gandy, & A. E. Grant (Eds.), *Framing public life: Perspectives on media and our understanding of the social world* (pp. 7–31). Lawrence Erlbaum Associates.
- Scheufele, D. A. (1999). Framing as a theory of media effects. *Journal of Communication*, 49(1), 103–122. <https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1999.tb02784.x>
- Scheufele, D. A., & Tewksbury, D. (2007). Framing, agenda setting, and priming: The evolution of three media effects models. *Journal of Communication*, 57(1), 9–20. <https://doi.org/10.1111/j.0021-9916.2007.00326.x>
- Severin, W. J., & Tankard, J. W. (2001). *Communication theories: Origins, methods, and uses in the mass media* (5th ed.). Longman.
- Shoemaker, P. J., & Reese, S. D. (2014). *Mediating the message in the 21st century: A media sociology perspective* (3rd ed.). Routledge.
- Siregar, A. E. (2019). Independensi editorial media Islam Indonesia dalam era post-truth: Antara idealisme dan pragmatisme. *Komunikasi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 12(2), 89–104. <https://doi.org/10.21107/ilkom.v12i2.5811>
- Siebert, F. S., Peterson, T., & Schramm, W. (1956). *Four theories of the press*. University of Illinois Press.
- Tankard, J. W. (2001). The empirical approach to the study of media framing. In S. D. Reese, O. H. Gandy, & A. E. Grant (Eds.), *Framing public life* (pp. 95–106). Lawrence Erlbaum Associates.
- Tuchman, G. (1978). *Making news: A study in the construction of reality*. Free Press.
- United Nations. (2024). Question of Palestine: UN resolutions. <https://www.un.org/unispal/>
- Van Dijk, T. A. (1988). *News as discourse*. Lawrence Erlbaum Associates.
- Van Dijk, T. A. (1993). Principles of critical discourse analysis. *Discourse & Society*, 4(2), 249–283. <https://doi.org/10.1177/0957926593004002006>
- Winarso, H. P. (2005). *Sosiologi komunikasi massa*. Prestasi Pustaka.

